

Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Mufti Arief Arfiansyah¹⁾

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri

ARTICLES INFORMATION



Journal of Islamic Finance
and Accounting

Vol. 3 No. 1
Januari-Mei 2020
pp: 67-82

Department of Sharia
Accounting, Faculty of
Islamic Economics and
Business, IAIN Surakarta

*Keywords: Village Fund
Management Accountability,
Village Financial System,
Government Internal Control
System*

*JEL Classification Codes:
C12, P25, R50*

Abstract

This study aims to determine the effect of the Village Finance System (Siskeudes) and the Government Internal Control System (SPIP) on the accountability of village fund management. This study refers to a quantitative approach to the population of villages in Wonogiri District. Determination of the sample by random sampling technique. The process of collecting data uses the questionnaire method. Respondents in this study were the Village Head and Village Secretary. Data analysis uses multiple regression analysis. The results showed that 1) The Village Financial System (SISKEUDES) affected the accountability of village fund management. 2) Government Internal Control System (SPIP) influences the accountability of village fund management.

PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menunjukkan desa mendapatkan prioritas pembangunan nasional. Tujuan utama dari undang-undang desa untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-undang tersebut telah menggeser pendekatan pembangunan terhadap desa dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan. Desa menjadi prioritas pembangunan pemerintah sesuai Nawa Cita pemerintah yaitu pembangunan dari pinggiran yaitu desa.

Prioritas pembanguana desa melalui dana desa menggeser pusat tata kelola pemerintahan dari pusat berpindah dan berkembang di daerah. Peningkatan kualitas pelayanan dan percepatan

Corresponding author:

¹⁾ alarief1989@gmail.com

pembangunan serta pertumbuhan daerah menjadi tujuan utama perpindahan tata kelola pemerintahan. Desentralisasi tidak hanya hirarki pemerintahan tetapi desentralisasi fiskal pemerintah pusat ke pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun pemerintah desa. Desentralisasi fiskal sebagai kosekuensi otonomi daerah menimbulkan kewajiban akan akuntabilitas keuangan publik. Pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah dituntut berorientasi pada kepentingan publik. Hal tersebut meliputi tuntutan pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan melakukan pengendalian atas anggaran publik.

Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing (Pahlevi, 2015). Untuk mendukung pencapaian target RPJMN 2020-2024 dalam membangun desa mandiri alokasi anggaran nasional untuk dana desa sebesar Rp 400 Triliun selama lima tahun kedepan hingga 2024. Setiap tahun anggaran dana desa dimungkinkan mengalami peningkatan. Total anggaran dana desa sebesar Rp 257 triliun selama lima tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya sejak tahun 2015 hingga 2019. Rinciannya Rp 20,67 trilliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 Triliun (2017), Rp 60 Triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019) (Kompas.com, 2019). Tahun 2018 batal naik karena mengalami beberapa persoalan antara lain rawan dikorupsi. Menurut Indonesia Corruption Watch (2018) bahwa korupsi di desa, utamanya yang menyangkut anggaran desa, merupakan salah satu problem mendasar. Problem ini muncul karena implementasi pengelolaan anggaran di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Berdasarkan kajian dan pemantauan ICW, pada tahun 2015-2019, kepala desa menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi di desa menunjukkan peningkatan. Tahun 2016-2017 sebanyak 110 kepala desa jadi tersangka, sedangkan tahun 2018 ada 102 tersangka (Tempo.co, 2019). Selain itu, data ICW menunjukkan terdapat 46 kasus korupsi dana desa selama tahun 2019 yang merugikan negara hingga Rp 32,3 miliar. Menurut ICW, Pelbagai faktor menjadi penyebab korupsi di sektor desa, diantaranya karena minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, dan tingginya biaya politik pemilihan kepala desa (Outlook Dana Desa, ICW, 2018).

Belum adanya sistem pengawasan yang komprehensif terhadap pengelolaan dana desa menyebabkan banyaknya korupsi dana desa. Pemerintah dituntut untuk mendorong keterbukaan dan akuntabilitas keuangan desa dengan pemanfaatan teknologi informasi (Kompas.com). Berdasarkan ketentuan pasal 24 huruf g UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berasaskan akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas antara lain penggunaan teknologi

informasi dalam pengelolaan dana desa juga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan. Sistem keuangan khusus untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes merupakan penerapan teknologi informasi berupa aplikasi yang berkonsep akuntabilitas dalam mempertanggung-jawabkan keuangan desa. Menurut penelitian Aziiz & Prastiti (2019), Sugiarti & Yudianto (2017), Wardani & Andriyani (2017) menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan memanfaatkan teknologi proses pelaporan keuangan lebih cepat dan mudah diakses sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pemerintah desa bagian dari entitas pelaporan keuangan yang memiliki kewajiban dalam menyajikan laporan keuangan sesuai ketentuan perundangan. Kendala dan permasalahan dalam penyajian laporan keuangan dana desa antara lain, masih rendahnya pemahaman tentang penyajian laporan keuangan desa yang memuat informasi lengkap dan relevan serta ketersediaan secara langsung. Ketersediaan sistem informasi yang memadai menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan dana desa.

Perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pengendalian dilakukan sesuai pedoman sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagai tolak ukur dan standar pengendalian pelaksanaan dana desa. Pengendalian intern menjaga proses operasi pemerintahan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Rencana organisasi dan metode untuk menjaga dan melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya merupakan isi dari dilakukannya pengendalian intern (Martini dkk, 2019).

Masyarakat belum memahami pentingnya akuntabilitas keuangan desa dan tidak mengetahui bagaimana dana desa digunakan serta untuk kebutuhan apa dana itu dimanfaatkan. Masyarakat sebagai pemilik dana seharusnya mengetahui penggunaan dana desa dan pemanfaatannya. Partisipasi dan pengawasan dari masyarakat dalam penggunaan desa dimaksudkan agar tujuan dana desa dalam menciptakan desa mandiri dapat terwujud. Pemerintah pusat sudah memiliki sistem untuk melakukan pengendalian dalam jalannya pemerintahan yaitu sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem ini dirancang secara lengkap tidak hanya untuk mencegah tetapi membudayakan budaya pengawasan.

Penelitian Yudianto & Ekasari, 2017 dan Martini dkk, 2019) menunjukkan SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Untuk mendukung akuntabilitas, dibutuhkan adanya sistem pengendalian intern yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan (Sari, Ghozali & Achmad, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Teori Stewardship

Konsep *stewardship* menganggap manajemen suatu perusahaan bertanggungjawab kepada pemilik untuk mengelola kekayaan yang telah dipercayakan kepadanya. Pemilik perusahaan bertindak sebagai prinsipal dan manajemen sebagai *steward*. Hakekat sifat-sifat manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dan bertanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran menjadi dasar filosofi dibangunnya teori *stewardship* untuk kepentingan publik. Teori *stewardship* juga mmenganggap bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dalam melindungi, memaksimalkan kinerja organisasi dan kepentingan pemilik dengan kepuasan pemilik.

Pemerintah desa direpresentasikan oleh kepala desa bertindak sebagai *steward*, sedangkan masyarakat bertindak sebagai pemilik dana (*Prinsipal*). Keterkaitan keduanya dapat ditunjukkan dari akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga pemerintah desa berkewajiban untuk menyajikan dan mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh para pemilik sebagai pengguna informasi dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Kepala desa mewujudkan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik atau masyarakat desa.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa sebagai konsekuensi perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dikembangkanlah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi Sistem Keuangan Desa dibuat sederhana, mudah dioperasikan dan dilengkapi fitur-fitur sesuai kebutuhan (BPKP, 2018). Sekali input transaksi, dapat menghasilkan output yang dibutuhkan dan sesuai pertaturan yang berlaku seperti laporan realisasi, APB Desa dan laporan lainnya. Dokumen yang diinput dalam sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu dokumen penatausahaan, bukti penerimaan, Rencana Anggaran Belanja (RAB), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Setoran Pajak (SSP), laporan penganggaran (Perdes APBDesa, APBDesa per sumber dana), dan laporan penatausahaan seperti Buku kas umum, Buku bank, Buku pajak, Buku Pembantu, dan Register.

Menurut DeLone dan McLean, (1992) dalam Harjito, dkk (2014) menyatakan bahwa dimensi untuk mengetahui kesuksesan implementasi sebuah sistem antara lain dimensi pengguna sistem dan pengaruh organisasional. Pemerintah desa selaku organisasi pengguna dan aparatur desa sebagai pengguna sistem mendapatkan manfaat dari sistem keuangan desa dalam pencapaian akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi Siskeudes sukses dalam memberi manfaat untuk mempermudah pemerintah desa dan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. *Aplikasi* Siskeudes menjadi alat bagi pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa. Dengan pelaporan yang terintegrasi dan terkomputerisasi akan meminimalkan tindak penyimpangan sehingga akan semakin akuntabel. Semakin baik dalam pengoperasian dan penggunaan aplikasi Siskeudes maka akan semakin akuntabel pengelolaan dana desa.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah *proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan*. Sistem pengendalian diharapkan dapat menciptakan budaya pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintahan sehingga dapat mendeteksi sejak dini kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara.

Unsur sistem pengendalian meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

SPIP dirancang dalam rangka pengawasan demi mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Para pimpinan pemerintahan diwajibkan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya pada pimpinan unit kerja terkecil tetapi masing-masing individu. Kehadiran sistem pengendalian bukan hanya upaya membentuk mekanisme administratif tetapi upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku pemerintah desa. Peraturan yang diterbitkan merupakan awal dari langkah perbaikan. Oleh Karena itu, implementasi SPIP sangat bergantung kepada komitmen, teladan kepala desa dan niat baik dari seluruh elemen aparatur intern pemerintah desa.

Akuntabilitas

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan BPD. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007). Pemerintah desa harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai bentuk pertanggung-jawaban pengelolaan dana desa yang telah dipercayakan sebagai pelaksanaan kewajiban kepala desa dalam rangka pencapaian tujuan desa. Akuntabilitas diharapkan mampu memperbaiki kualitas kinerja pemerintahan desa sehingga pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat. Kepercayaan inilah yang akan mengurangi tingkat penyimpangan dana desa sehingga masyarakat desa dapat diberdayakan menjadi masyarakat mandiri dan pada akhirnya menjadi desa mandiri.

Pengaruh Aplikasi Sistem Keuangan desa (Siskeudes) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan desa dan berkonsep akuntabilitas yakni mampu mempertanggungjawabkan kemana uang atau Dana Desa tersebut digunakan. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa yang memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, salah satu upaya dengan mengimplementasikan Aplikasi Siskeudes, baik dari tahap perencanaan, pelaporan dan pertanggung-jawabannya. Penerapan Aplikasi Siskeudes memudahkan aparat desa dalam melakukan penyusunan berbagai dokumen penatausahaan keuangan dan laporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem keuangan yang baik dibutuhkan untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan pemerintahan desa. Penggunaan sistem keuangan memberikan kemudahan dalam penatausahaan dan mencegah terhadap potensi penyimpangan. Semakin baik penggunaan sistem keuangan maka akan semakin baik pula pencapaian akuntabilitasnya. Jika sistem dapat digunakan maka hal tersebut menunjukkan bahwa seorang akan terbantu saat bekerja dan cenderung menggunakan sistem tersebut secara terus menerus (Harjito dkk, 2014). Sistem keuangan yang baik memudahkan penggunaan dan kebermanfaatannya akan berdampak pada tingginya pencapaiannya akuntabilitas yang tercermin pada aspek kejujuran, ketaatan perundangan dan proses pengelolaan dana desa. Penelitian Aziiz & Prastiti (2019), Triyono dkk (2019), Sugiarti & Yudianto (2017), Wardani & Andriyani (2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan temuan empiris tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah

H1 : Aplikasi Sistem Keuangan desa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Penyelenggaraan pemerintahan baik perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali serta efisien dan efektif. Untuk terwujudnya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang efisien dan efektif, maka dibutuhkan suatu sistem yang memberi keyakinan memadai terkait pelaporan pengelolaan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.

Sistem Pengendalian Intern dalam pemerintahan merupakan faktor yang penting, disebabkan dengan adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas pemerintah desa. Adanya Sistem Pengendalian Internal dapat memberikan keyakinan memadai terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan undang-undang sehingga memenuhi kriteria akuntabilitas.

Sari dkk (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi akuntabilitas. Menurut Yudianto & Sugiarti (2017) dalam penelitiannya menunjukkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada desa-desa di Kabupaten Karawang mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut juga didukung hasil penelitian Penelitian Martini dkk, (2019), Triyono dkk (2019), Widyatama & Diarapati, (2017), dan Yudianto & Sugiarti, (2017), menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, maka hipotesisnya adalah

H2 : Sistem pengendalian Intern pemerintah mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yaitu analisis regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen Aplikasi Sistem Keuangan Desa (X1) dan Sistem Pengendalian Intern pemerintah (X2) terhadap variabel dependen akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Variabel Aplikasi Sistem Keuangan Desa dijabarkan dalam indikator kemudahan dalam penggunaan, risiko, fitur layanan, pemanfaatan penggunaan perangkat lunak aplikasi (Attatir, 2017). Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dirinci indikatornya adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008). Sedangkan akuntabilitas ditentukan dengan indikator perumusan rencana keuangan, pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, melakukan evaluasi atas kinerja keuangan, pelaksanaan pelaporan keuangan (Zeyn, 2011).

Sumber data penelitin berasal dari jawaban responden melalui kuesioner yang telah diuji dengan uji validitas dan reliabilitas. Responden penelitian meliputi kepala desa dan sekretaris desa sebagai perwakilan pemerintah desa. Populasi penelitian adalah seluruh pemerintah desa di Kabupaten Wonogiri sejumlah 251 Desa. Penelitian menggunakan teknik sampling acak dengan rumus slovin sebanyak 150 sampel. Proses analisis data menggunakan program SPSS. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Pengujian prasarat analisis yang meliputi pengujian normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Sedangkan pengujian hipotesis dengan uji koefisien determinan, uji F dan uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tingkat kevalidan instrumen penelitian dilakukan terhadap kuesioner dengan 27 butir pertanyaan. Hasil pengolahan data uji instrumen pada output *Item Total Statistic* menunjukkan bahwa nilai *Corrected Item Total Correlation* pada item-item pertanyaan dalam kedua variabel yang diuji lebih besar dari r tabel sebesar 0,160 dengan N=150 dan taraf kepercayaan 5%. Sehingga semua item pertanyaan valid karena nilai *Corrected Item Total Correlation* lebih besar dari r hitung.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menunjukkan konsistensi suatu instrumen dalam mengukur gejala yang sama (Umar, 2008:113). Hasil analisis tersebut akan diperoleh melalui *cronbach's alpha*, variabel dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* > 0,7. Nilai *cronbach's alpha* pada ketiga variabel memiliki nilai diatas 0,7. Maka kuesioner dapat dinyatakan reliabel.

Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>cronbach's alpha</i>	Keterangan
SISKEUDES	0,769	Reliabel
SPIP	0,750	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,771	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS

Uji Normalitas Data

Uji Normalitas menggunakan analisis statistik dengan uji Kolmogorov Smirnov dengan kriteria *probability value* > 0,05, maka data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data penelitian terdistribusi normal yang dibuktikan dengan *asympt.sig* sebesar 0,067 yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikan sebesar 5%. Maka, model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.94699492
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.106
	Negative	-.061
Kolmogorov-Smirnov Z		1.303
Asymp. Sig. (2-tailed)		.067

Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS

Uji Multikolonieritas

Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi antar variabel independennya. Kriteria dalam pengujian multikolonieritas dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Kriterianya, jika nilai *tolerance* > 0,01 dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolonieritas. Hasil uji multikolonieritas ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
SISKEUDES	,658	1,520
SPIP	,658	1,520

Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel independen yang digunakan dalam model regresi memiliki nilai di atas 0,01 dan nilai VIF nya di atas 10. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa antar variabel independen dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Penelitian ini menggunakan uji Gletser dalam meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen sehingga dihasilkan *probability value*. Dari tabel di bawah menunjukkan bahwa *Sign* dari residual nilainya diatas 0,05. Hal ini menunjukkan tidak adanya gejala heteroskedastisitas dalam persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	2,236	1,402		1.594	,113
SISKEUDES	.044	.031	.143	1.415	.159
SPIP	-.067	.043	-.156	-1.550	.123

Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS

Hasil Analisis Data

Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan bukti empiris terkait pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rerata populasi atau nilai rerata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang ingin diketahui (Ghozali, 2011: 98). Persamaan regresi yang digunakan adalah persamaan regresi linear berganda (*multiple regression*). Pada Tabel berikut ini ditampilkan hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

	Koefisien	Nilai t	Sig.
(Constant)	6,869	2,990	,003
SISKEUDES	,187	3,678	,000
SPIP	,518	7,348	,000
R			0,711
R Square			0,506
Adjusted R Square			0,499
F Hitung			75,335
Sign F			0,000

Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda di atas, maka persamaan regresi penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

$$AKT = 6,869 + 0,187SISKEUDES + 0,518SPIP + \varepsilon_{it}$$

Uji Ketepatan Model (Uji F)

Berdasarkan hasil uji ketepatan model atau uji F terlihat dalam Tabel 6 di atas model regresi berganda yang menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen memiliki sig F nya 0,000^b ($0,000 < 0,05$) sedangkan F hitung sebesar 75,335 lebih besar dari F tabel sebesar 3,06 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011: 97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Pada Tabel 6 menunjukkan besarnya nilai R sebesar 0,711, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan nilai *adjusted R Square* sebesar 0,499 hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 49,9 %. Sementara itu, sisanya sebesar 50,1 % ($100\% - 49,9\%$) dipengaruhi oleh variabel atau faktor-faktor lain di luar model yang diteliti.

Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan

Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan perhitungan, nilai t hitung sebesar 3,678 lebih besar dari t tabel sebesar 1,97623 ($t \text{ hitung } 3,678 > t \text{ tabel } 1,97623$) dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal itu menunjukkan bahwa sistem keuangan desa memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aplikasi Siskeudes dirancang untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Siskeudes menjadi alat bagi pemer-

intah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa sesuai amanat Permendagri No. 113 tahun 2014. Aplikasi Siskeudes memberikan kemudahan dalam pengelolaan baik dari perencanaan hingga pelaporan. Semua terintegrasi dalam aplikasi Siskeudes dan penggunaannya mudah dan dilengkapi dengan fitur-fitur yang dibutuhkan desa. Penggunaan aplikasi Siskeudes juga didukung dengan pembaruan yang berkelanjutan serta adanya pendamping desa dalam proses pemanfaatan aplikasi Siskeudes sehingga penerapan siskeudes dapat berjalan dengan baik. Penerapan Siskeudes masih terbatas dalam pemakaian di luar jaringan. Artinya penerapan Siskeudes hanya dapat diakses oleh operator siskeudes di masing-masing desa dan belum terintegrasi dengan aparatur pengendalian ditingkat kecamatan dan kabupaten. Sehingga pengawasan dan pengendalian oleh aparatur pengendalian tidak dapat dilakukan secara cepat. Dengan pelaporan yang terintegrasi dan terkoneksi jaringan akan meminimalkan tindak penyimpangan sehingga akan semakin akuntabel. Semakin baik dalam pengoperasian dan penggunaan aplikasi Siskeudes maka akan semakin akuntabel pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hendaris & Siraz (2020) bahwa implementasi Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Triyono dkk (2019) juga menunjukkan Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian juga sesuai dengan hasil penelitian Sugiarti & Yudianto (2017) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian juga sesuai dengan penelitin Putra, dkk (2016), Lusiono (2017), Murungi & Kayigamba (2015). Namun, tidak sesuai dengan penelitian Amalya, dkk (2017) yang menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan nilai t hitung sebesar 7,348 lebih besar dari t tabel sebesar 1,97623 (t hitung 7,348 > t tabel 1,97623) dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) artinya bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian intern pemerintah memberikan keyakinan memadai terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan perundang-undangan sehingga memenuhi kriteria akuntabilitas. Pemerintah desa telah menjalankan asas-asas dalam pengendalian intern, baik dalam pencapaian tujuan secara efisien dan efektif, pelaporan pengelolaan keuangan secara andal, mengamankan aset dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian pengelolaan dana desa dilakukan berjenjang dimulai dari pengelola keuangan dana desa hingga kepala desa melalui penciptaan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, komunikasi efektif, otorisasi transaksi dan pemantauan dan pengawasan dari BPD. Selain itu, pengendalian dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan

oleh bupati berkoordinasi dengan APIP kabupaten.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Martini, dkk (2019) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sembawa. Penelitian Yudianto & Sugiarti (2017) yang menunjukkan sistem pengendalian internal pemerintah mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu juga sejalan dengan Penelitian Sari dkk (2017), Yesinia, dkk (2018), Kewo (2017), Aramide & Bashir (2015) dan Iclas, dkk (2014) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dapat mempengaruhi akuntabilitas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Beberapa saran yang dapat ditindaklanjuti pada penelitian lanjutan. Variabel sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah hanya menjelaskan 49,9 % terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka pada penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengembangkan hasil penelitian ini dengan menambahkan variabel lain dan menggunakan alat analisis yang berbeda. Pemilihan responden harus diperhatikan yaitu pihak yang benar-benar mewakili pemerintah desa yaitu kepala desa sebagai pemegang kuasa atas dana desa di pemerintahan desa atau perangkat desa sebagai operator pelaksana dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalya, T., Akram, & Pituringsih, E. (2017). Determinants Of Village Financial Management And Its Implication Toward Accountability: Study On Village Governance In West Lombok Regency. *International Journal of Research in Advent Technology*, Vol.5, No.12.
- Aramide, S.F., & Bashir, M.M. (2015). The Effectiveness of Internal Control Systems and Financial Accountability at Local Government Level in Nigeria. *International Journal of Research in Business Management (IMPACT: IJRBM)* Vol. 3 : 1 - 6.
- Attatir, M.A. (2017). Analisis Kemanfaatan Perangkat Lunak Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Sebuah Studi Eksploratif Berbasis Aspiratif Pada Kantor Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kediri). <http://:academia.edu>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2020.
- Aziiz, M.N & Prastiti, S.D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 6, No. 2 Juli 2019, Hal. 280-344.

- Bunga, Halida. 2019. ICW Beberkan Pola Korupsi Dana Desa. Diakses tanggal 26 Maret 2020 dari <https://nasional.tempo.co/read/1270091/icw-beberkan-pola-korupsi-dana-desa>
- Gatra, Sandro. 2019. Total Dana Desa 2019-2024 Rp 400 Triliun. Diakses tanggal 26 Maret 2020 dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400-triliun->
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi 4*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ichlas, M., Hasan, B. & Arfan, M. (2014). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala*, Vol 3, No. 4 November 2014, Hal. 76-84.
- Halim, A. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah. Seri Bunga Rampai*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Harjito, Y., Achyani, F., & Payamta. (2014). Implementasi E-Procurement Ditinjau Dari Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi Dengan Menggunakan Model DeLone dan McLean. *3rd Economics & Business Research Festival*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, Hal. 1633-1650.
- Hendaris, R. Budi & Siraz, Rahmat. (2020). Analysis Of Factors Influencing The Accountability Of Illage Funds Management. *DIJEMSS*, Vol 1, Issue 3, Februari 2020 Hal. 400-411.
- Indonesia Curroption Whats. (2018). *Outlok Dana desa 2018*. Jakarta.
- Kelola Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabilitas Dengan Siskeudes*. <http://www.bpkp.go.id> . Diakses pada tanggal 22 Oktober 2018.
- Kewo, C. L. (2017). The Influence of Internal Control Implementation and Managerial Performance on Financial Accountability Local Government in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues* Vol. 7 Issue 1 : 293-297.
- Lusiono. (2017). Analisis Penerimaan Aplikasi Siskeudes di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 5 No. 2 Desember 2017.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademik Akiuntansi*, Vol. 2 No. 1, 2019 Hal. 106-123.

- Mulyana, B. (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, Hal. 1-13.
- Murungi, S.& Kayigamba, C. (2015). The Impact of Computerized Accounting System on Financial Reporting in the Ministry of Local Government of Rwanda. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS)* Vol. 6 No. 4 Hal : 261-26.
- Pahlevi, I. (2015). Dana Desa dan Permasalahannya. *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. VII No. 17 September 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Putra, R. E., Harryanto, & Indraswati. (2016). Pengaruh Kepemimpinan Dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Anggaran Dan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Luwu. *Jurnal Analisis*, Vol. 5 No. 2 Hal. 152-158.
- Sari, N., Ghozali, I. & Achmad, T. (2017). The Effect Of Internal Audit And Internal Control System On Public Accountability: The Empirical Study In Indonesia State Universities. *International Journal of Civil Engineering and technology*, 8(9) 2017. Hal. 157-166.
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Diakses pada tanggal 3 April 2020 dari <http://peperintah.net>.
- Sugiarti, E & Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-desanya di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). *Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice* (580-590). Bandung: Universitas Widyatama.
- Triyono, Achyani, F., & Arfiansyah, M.A. (2019). The Determinant Accountability of Village Funds Management (Study in The Villages in Wonogiri District). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 4 No. 2 September 2019 Hal. 118-135.
- Umar, H. (2008). *Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- Yesinia, N.I., Yuliarti, N.C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10 (1), 2018, Hal. 105-112.
- Yudianto, I & Sugiarti, E. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Survei pada Desa-desanya di Wilayah Kabupaten Karawang). Tesis tidak dipublikasikan, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Wardani & Andriyani (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap keandalan pelaporan keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5 No. 2 Desember 2017.
- Widyatama, N. & Diarespati (2017). Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi dana desa (ADD). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 02 No. 02.
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol.1, No.1, Hal.21-37.

